

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2006

## Kontrak karya PT Koba Tin akan dievaluasi

Oleh BAMBANG DWI DJANUARTO  
*Bisnis Indonesia*

JAKARTA: Pemerintah akan mengevaluasi kontrak karya PT Koba Tin yang 75% sahamnya dimiliki oleh Malaysia Smelting Corporation Berhad (MSC), karena diduga menampung hasil tambang ilegal. "Sekarang sedang diteliti, sedang kita lihat karena adanya laporan tambang ilegal. Ada masalah hukum, penyidikannya Polri, tapi ada rekomendasi yang kita telaah karena terkait kontrak karya, kontrak karya adalah kewenangan kita," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan sebelum membahas RUU Energi dengan Komisi VII DPR, kemarin.

Dia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan

izin bagi perusahaan manapun untuk membeli timah dari tambang ilegal karena secara hukum jelas menyalahi aturan.

"Logikanya di mana, tidak mungkin pemerintah memberi izin untuk membeli timah dari tambang ilegal," tegasnya. Menteri ESDM akan segera memanggil Koba Tin, PT Timah, Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi serta pemerintah daerah untuk menyelidiki adanya dugaan penampungan timah ilegal.

Ketika ditanya tentang adanya tim yang melakukan verifikasi sebelum kontrak Koba Tin diperpanjang pada 2003, Purnomo langsung menghubungi Dirjen Minerba, Batubara dan Panas Bumi Simon Felix Sembiring.

"Tim itu ada dan hanya untuk peningkatan produksi,"

katanya usai menghubungi Simon.

Dia menuturkan jika memang ditemukan adanya indikasi korupsi dalam perpanjangan kontrak tersebut maka semua pihak yang memiliki data dipersilakan melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

### Diperpanjang

Kontrak karya Koba Tin telah habis pada 2003, tapi oleh pemerintah diperpanjang lagi selama 10 tahun hingga 2013.

Kapolri Jenderal Sutanto pada 15 November 2006 telah mengirim surat kepada lima menteri yang mendesak kontrak karya pemerintah dengan Koba Tin harus dicabut karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan itu yakni menampung hasil tam-

bang ilegal.

Kapolri menegaskan adanya praktik tambang inkonvensional itu bertentangan dengan ketentuan kontrak karya Koba Tin dengan pemerintah dan melanggar sejumlah perundang-undangan seperti UU No. 11/1967 tentang Pertambangan, UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang, dan UU No.23/1997 tentang Lingkungan Hidup.

Ketika dikonfirmasi, Menteri ESDM mengakui telah menerima surat dari Kapolri yang isinya mendesak pemutusan kontrak karya dengan Koba Tin.

Surat Kapolri dengan No.Pol B/2587/XI/2006 itu ditujukan kepada Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan Menteri Negara BUMN.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<ul style="list-style-type: none"> <li>● BISNIS INDONESIA</li> <li>○ INVESTOR DAILY</li> <li>○ KOMPAS</li> <li>○ KORAN TEMPO</li> <li>○ MEDIA INDONESIA</li> <li>○ PIKIRAN RAKYAT</li> <li>○ RAKYAT MERDEKA</li> <li>○ REPUBLIKA</li> <li>○ SUARA KARYA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ SEPUTAR INDONESIA</li> <li>○ SUARA PEMBARUAN</li> <li>○ SINAR HARAPAN</li> <li>○ TABLOID KONTAN</li> <li>○ THE JAKARTA POST</li> <li>○ MAJALAH GATRA</li> <li>○ MAJALAH TEMPO</li> <li>○ MAJALAH TRUST</li> <li>○</li> </ul>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV <b>DES</b>																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : T 5															TAHUN 2006															

**Peti di Kalteng keruk 50 kg emas per hari**

PALANGKARAYA: Kegiatan pertambangan emas tanpa izin (peti) di Provinsi Kalimantan Tengah oleh warga masyarakat yang marak dalam beberapa tahun terakhir diperkirakan mampu menghasilkan emas mencapai 50 kilogram per hari.

"Kami memperkirakan beberapa tahun lalu jumlah peti telah mencapai 2000-an unit, dengan produksi bisa mencapai 50 kilogram per hari," kata Kepala Subdin Pertambangan Umum Dinas Pertambangan Kalimantan Tengah Syahril Tarigan di Palangkaraya, kemarin.

Menurut dia, potensi pertambangan emas yang melimpah di Kalteng telah memunculkan ribuan unit peti yang beroperasi sejak beberapa tahun lalu, meski kini jumlahnya kemungkinan telah menurun. (ANTARA)

MONITOR BERITA

<p><input type="radio"/> BISNIS INDONESIA  <input type="radio"/> INVESTOR DAILY  <input type="radio"/> KOMPAS  <input type="radio"/> KORAN TEMPO  <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA  <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT  <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA  <input checked="" type="radio"/> REPUBLIKA  <input type="radio"/> SUARA KARYA</p>	<p><input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA  <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN  <input type="radio"/> SINAR HARAPAN  <input type="radio"/> TABLOID KONTAN  <input type="radio"/> THE JAKARTA POST  <input type="radio"/> MAJALAH GATRA  <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO  <input type="radio"/> MAJALAH TRUST  <input type="radio"/> O</p>										
<p>KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK                      <input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA                      <input type="checkbox"/> GEOLOGI  <input type="checkbox"/> MIGAS                                      DAN PANAS BUMI                                      <input type="checkbox"/> UMUM</p>											
<p>JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    <u>DES</u></p>											
<p>1 2 3 4 5 6 <u>7</u> 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</p>											
<p>HALAMAN : 15</p>										<p>TAHUN 2006</p>	

## Australia akan Jual Uranium ke Cina

CANBERRA — Pemerintah Australia menyatakan siap menjual Uranium mereka kepada Cina. Penjualan yang akan dilakukan mulai tahun depan itu terjadi setelah sebuah komisi di Parlemen menyetujui transaksi barang berbahaya itu dalam sidang yang mereka gelar kemarin (6/12).

Australia, —negara pemilik 40 persen Uranium dunia— mencapai kesepakatan dan meneken perjanjian pada April lalu, untuk mulai mengekspor Uranium ke Cina. Transaksi itu sendiri diyakini akan mampu meningkatkan pendapatan tahunan negara itu, sehubungan jumlahnya yang cukup besar. Disebut-sebut, dana yang akan ditangguk Australia dari penjualan itu tidak kurang dari sekitar 1 miliar dolar AS. Besarnya nilai transaksi itulah, yang kemungkinan menjadikan komisi Parlemen itu cukup mudah untuk kemudian menyetujui transaksi tersebut, dengan argumen kepentingan

nasional Australia.

Cina sendiri tercatat merupakan penanda tangan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treaty). Tidak seperti India, Cina yang sejauh ini berkali-kali mencoba mendapatkan persetujuan untuk bisa membeli Uranium Australia, sering gagal. Peluang sukses seperti yang terjadi kemarin itu pun dimungkinkan setelah Cina menyatakan komitmen untuk menggunakan Uranium itu semata tujuan damai.

“Penawaran perjanjian *safeguards* menjamin bahwa Cina akan menggunakan Uranium kami, dan teknologi yang digunakannya semata hanya untuk tujuan perdamaian dan kemakmuran,” kata Ketua Komite Parlemen, Andrew Southcott.

Cina, negara dengan jumlah penduduk yang begitu besar, didorong pertumbuhan ekonomi yang pesat dan masif, memiliki kebutuhan yang

tinggi akan energi. karena itulah, negara itu berkeinginan memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir guna memenuhi kebutuhan energi negaranya. Selain itu nuklir juga diyakini mampu mengurangi emisi efek rumah kaca (*greenhouse effect*), tidak sebagaimana bahan bakar fosil.

Meskipun mempunyai cadangan yang besar, Australia secara resmi hanya menyumbang 23 persen pasokan Uranium dunia. Saat ini, negara Kanguru itu melakukan ekspor Uranium ke 36 negara, di bawah jaminan dan prasyarat yang ketat bahwa Uranium itu hanya akan digunakan untuk tujuan damai.

Laporan lain menyebutkan, Senin (5/12) lalu, Parlemen Australia juga menyeru pemerintah untuk memberikan bantuan dan dukungan penuh kepada Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), untuk memperkuat inspeksi di Cina. ■ ant

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA						<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																								
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI				<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																								
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 6											TAHUN 2006																			

## Timah dan Koba Tin Dilarang Tampung Bahan Baku Ilegal

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah tidak mengizinkan PT Timah (Tbk) dan PT Koba Tin menampung bahan baku timah dari tambang inkonvensional atau pertambangan yang dilakukan oleh rakyat tanpa memperdulikan aturan. Menampung hasil tambang ilegal tersebut dapat dikenakan saksi hingga ancaman pencabutan kontrak karya (KK).

Di lain pihak, pemerintah juga memastikan tidak akan melakukan perlakuan khusus dalam kasus perdagangan timah ilegal yang tengah dihadapi PT Koba Tin saat ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah tidak mungkin memberikan izin atau memerintahkan produsen timah untuk membeli bijih timah ilegal. Sebab hal itu sama saja dengan melegalkan penambangan inkonvensional yang tergolong kegiatan ilegal.

"Sebab tambang inkonvensional itu jelas tambang ilegal. Logikanya jika membeli barang hasil perbuatan ilegal, berarti ilegal juga dalam kontrak karya," kata Purnomo sebelum menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (6/12).

Pasalnya, lanjut dia, dalam KK terdapat klausul-klausul yang harus ditaati, di mana tidak disebutkan ada pertambangan ilegal. "Kontrak karya kita tidak menyangkut *illegal mining* dan ini urusan pidana. Sehingga kalau menambang tidak pakai izin, tidak boleh," ujarnya.

Meski demikian, Purnomo mengingatkan, tidak semua pembelian bijih timah dari tambang rakyat dapat disebut ilegal. Dalam hal itu terlebih dahulu harus melihat proses pembeliannya. "Kita juga harus melihat prosesnya secara baik. Begitu juga urusan smelter (pabrik pengolahan biji timah) juga harus diatur. Dan kalau perizinannya smelter itu dari Departemen Perindustrian," ujarnya.

Menanggapi surat Kapolri yang menyatakan dugaan PT Koba Tin merupakan dalang demonstrasi penambang inkonvensional di Bangka-Belitung yang berakhir rusuh bulan lalu, Purnomo mengatakan, pihaknya masih harus meneliti lebih lanjut. Ini termasuk rekomendasi Kapolri agar Kontrak Karya Koba Tin dicabut.

Menurut Purnomo, pemerintah akan melihat benar atau tidaknya Koba Tin selama ini ikut menampung hasil tambang penambang liar dan mengeksportnya. "Sudah ada laporan ke kita dan kami teliti lagi karena itu menyangkut kontrak. Kami tidak bisa buru-buru memutuskan (putus kontrak). Tetapi kita pastikan tidak akan ada perlakuan khusus soal itu, kita lihat proses ini berjalan terus," ujarnya. (Abdul Chotr)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2006

PERTAMBANGAN

## Pemerintah Larang Tampung Timah Ilegal

**JAKARTA (Media):** Pemerintah melarang produsen timah, termasuk PT Timah Tbk, membeli bijih timah dari tambang rakyat ilegal. Menampung hasil tambang ilegal dapat dikenai sanksi pidana dan pencabutan kontrak karya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menegaskan hal itu kepada wartawan sebelum menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, kemarin.

Menurut Purnomo, pemerintah tidak mungkin memberikan izin atau memerintahkan produsen timah untuk membeli bijih timah ilegal.

Sebab, hal itu sama saja dengan melegalkan penambangan inkonvensional (tambang rakyat) yang tergolong kegiatan ilegal.

"Kalau tambang inkonvensional itu jelas tambang ilegal. Logikanya, membeli barang hasil perbuatan ilegal ya ilegal juga," ujarnya.

Namun, Purnomo mengingatk-

kan, tidak semua pembelian bijih timah dari tambang rakyat dapat disebut ilegal. Dalam hal itu terlebih dahulu harus melihat proses pembeliannya.

Dalam menanggapi surat Kapolri yang menyatakan dugaan PT Koba Tin merupakan dalang demonstrasi penambang inkonvensional di Bangka Belitung yang berakhir rusuh bulan lalu, Purnomo mengatakan pihaknya masih harus meneliti lebih lanjut. Termasuk rekomendasi Kapolri agar kontrak karya Koba Tin dicabut.

Menurut Purnomo, pemerintah akan meneliti benar atau tidaknya Koba Tin, yang selama ini ikut menampung hasil penambangan liar dan mengekspornya.

Awal Oktober lalu polisi menutup seluruh *smelter* (pabrik pengolahan bijih timah) yang membeli bijih timah yang dihasilkan dari tambang tanpa kontrak karya.

Sejumlah *smelter* swasta di Bangka Belitung dinilai melakukan pele-

buran timah tanpa izin. Pasalnya, mereka hanya mengantongi izin industri dan mengekspor logam timah kualitas rendah.

Dengan penutupan itu, tambang-tambang inkonvensional kehilangan pembeli dan kemungkinan besar akan beralih menjual ke produsen timah yang juga memegang kontrak karya seperti PT Timah dan Koba Tin.

Direktur Utama PT Timah Thobrani Alwi, beberapa waktu lalu, mengatakan pihaknya siap menampung hasil tambang inkonvensional. Bahkan, PT Timah telah mendapatkan komitmen pinjaman dari sejumlah bank lokal untuk sewaktu-waktu dipakai melakukan pembelian tersebut.

Selama ini Timah juga sudah membeli hasil tambang rakyat melalui program kemitraan. Dalam program itu, PT Timah menyerahkan pengelolaan tambang miliknya kepada masyarakat yang berminat.

(Ndy/E-2)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGST			SEPT			OKT			NOV			DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

HALAMAN : 14

TAHUN 2006

AMIN MADANI/REPUBLIKA



**MINERBA:** Mentéri Purnomo Yusgiantoro (kanan), rapat dengan Panja Minerba (mineral dan batubara) di ruangan Komisi VII, gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/12). Rapat itu membahas RUU Minerba yang akan mengatur pengolahan sumber daya alam.

57

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																																																	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>APR</th> <th>MEI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGST</th> <th>SEPT</th> <th>OKT</th> <th>NOV</th> <th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>31</td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																							
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																							
25	26	27	28	29	30	31																																												
HALAMAN : 82											TAHUN 2006																																							

## DPR Ketahui Perpanjangan Kontrak Koba Tin

JAKARTA — Direktur Jenderal Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Simon Sembiring mengatakan perpanjangan kontrak karya PT Koba Tin telah diketahui Dewan Perwakilan Rakyat. Perpanjangan kontrak itu sesuai dengan prosedur serta tidak ada unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme. "Perpanjangan itu ditandatangani pada 2000, sudah ke DPR, lalu ke Presiden," kata Simon kepada *Tempo* di Jakarta kemarin. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutanto mengirim surat bernomor B/2587/XI/2006 tertanggal 15 November 2006 tentang penambangan timah dan perdagangan timah ilegal di Bangka Belitung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Dalam surat itu, Kepala Polri meminta pembatalan kontrak karya Koba Tin karena kontrak karya sudah habis, cadangan timah sesuai

dengan kontrak karya telah habis, dan Koba Tin diduga merupakan dalang kemelut pertimahan di Bangka Belitung. Kepala Polri juga mengatakan perlunya pencabutan persetujuan pemerintah yang memperbolehkan Koba Tin menerima bijih timah hasil pertambangan timah inkonvensional (ilegal).

Pada 2004, Koba Tin diizinkan pemerintah menerima hasil pertambangan timah ilegal di wilayah kontrak karyanya maksimum 12 ribu ton. Menurut Kepala Polri, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, serta Ketentuan Kontrak Karya antara Koba Tin dan pemerintah.

Mengenai dugaan Kepala Polri bahwa Koba Tin menampung timah ilegal, Simon mengatakan hal itu belum terbukti. "Sudah ada bukti belum (Koba Tin) melakukan itu? Kalau ada bukti, akan kita tin-

dak. Kita *straight* dengan kontrak," ujarnya. Simon membantah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dianggap melindungi Koba Tin. "Apa yang kami lindungi?" kata Simon. Kontrak karya itu tidak bisa dihentikan begitu saja.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro juga mengatakan perpanjangan kontrak karya itu sudah diketahui DPR. "Bila ada unsur KKN, tangkap saja, mesti dilaporkan. Tapi, bila yang melaporkan salah, kita juga tangkap yang melaporkan," katanya kepada wartawan di DPR.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sedang meneliti hasil temuan Kepala Polri untuk mengecek kebenaran Koba Tin menampung timah dari penambang liar. Purnomo menyangkal pemerintah memberi izin menampung timah dari tambang ilegal. "Logikanya bagaimana? Masak pemerintah menyuruh beli dari tambang ilegal," ujarnya. Izin pertambangan sudah bisa ditangani pemerintah daerah sejak berlakunya

otonomi daerah.

Mengenai PT Timah yang menampung timah dari tambang rakyat, Purnomo juga akan mengkaji lebih lanjut. "Harus kami lihat juga prosesnya ini seperti apa antara PT Timah dan mereka," katanya. Dalam kontrak karya tidak ada klausul-klausul menyangkut tambang ilegal karena itu termasuk pidana. Purnomo juga membantah memiliki saham di Koba Tin dan juga memiliki saudara yang memiliki saham di Koba Tin. "Cek saja," ujarnya.

Sedangkan mengenai surat dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengizinkan Koba Tin mengambil timah dari tambang inkonvensional, Purnomo mengatakan surat itu dikeluarkan dalam rangka penambahan produksi Koba Tin. Namun, Ketua Komisi Energi DPR Agusman Effendi saat ditanyai mengenai perpanjangan kontrak karya sempat mengaku belum mendengar soal itu. "Nanti saya cek lebih lanjut, mungkin saya yang belum tahu." ● WHEE

## MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2006

## Pemerintah Larang Timah dan Koba Tin Tampung Hasil TI

JAKARTA – Pemerintah melarang produsen timah seperti PT Timah Tbk dan PT Koba Tin menampung dan membeli bijih timah dari pertambangan inkonvensional (TI) atau tambang rakyat ilegal. Apabila hal itu dilakukan, perusahaan dapat dikenai sanksi pencabutan kontrak karya (KK).

“Kalau tambang inkonvensional itu jelas tambang ilegal. Logikanya, membeli barang hasil perbuatan ilegal ya ilegal juga. Dalam kontrak karya tidak ada klausul mengenai itu,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro sebelum menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) RUU Energi dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (6/12).

Namun, Purnomo mengingatkan, tidak semua pembelian bijih timah dari tambang rakyat dapat disebut ilegal, karena terlebih dahulu harus melihat proses pembeliannya.

Menanggapi surat Kapolri yang mengenai dugaan PT Koba Tin merupakan dalang demonstrasi penambang inkonvensional di Bangka Belitung yang berakhir rusuh bulan lalu, kata Purnomo, pihaknya masih harus meneliti lebih lanjut. Termasuk rekomendasikan Kapolri agar KK PT Koba Tin dicabut.

Purnomo menuturkan, pemerintah akan melihat benar atau tidaknya PT Koba Tin selama ini ikut menampung hasil tambang penambang liar dan mengekspornya. “Sudah ada laporan dan kami teliti lagi karena itu menyangkut kontrak. Kami tidak bisa buru-buru memutuskan,” jelasnya.

Menurut Purnomo, pihaknya akan menjadwalkan rapat dengan sejumlah pihak terkait surat Kapolri tersebut. Pihak yang akan dipanggil antara lain PT Koba Tin, PT Timah, Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi serta pemerintah daerah Bangka Belitung (Babel).

Purnomo juga menepis tuduhan kalau pihaknya ragu-ragu dalam menindak PT Koba Tin. “Bukan soal ragu atau tidak, ini kan menyangkut kontrak karya, banyak aspek yang harus dilihat, seperti masalah hukumnya,” ujar Purnomo.

Sementara itu Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi Simon F Sembiring menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk menyelesaikan proses hukum yang membelit PT Koba Tin. “Kita serahkan saja kepada Polri untuk menangani kasus itu,” kata dia.

Anggota FPDIP DPR Yasonna Laoly menegaskan, Polri harus bertindak cepat mengusut kerugian negara dalam kasus perdagangan timah ilegal yang terjadi di Babel, termasuk melaksanakan surat Kapolri No B/2587/XI/2006 perihal pertambangan ilegal dan perdagangan ilegal Timah di provinsi tersebut.

“Jika ditemukan adanya penggelapan pajak dalam kasus itu serta delik korupsi dan kerugian negara, tersangkanya harus segera diajukan ke pengadilan untuk di proses sesuai hukum yang berlaku,” ujar dia.

Total produksi TI diperkirakan hampir mencapai sepertiga total produksi timah dunia. Total ekspor logam timah Indonesia pada 2006 diperkirakan mencapai 123.500 ton. Dari jumlah itu, kontribusi PT Timah Tbk sebesar 43.000 dan satu-satunya pesaingnya yang legal yakni PT Kobatin 20.500 ton. Sisanya, dari smelter swasta. (ari/ref)

59

# MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

DIKRITIK SOAL PENANGANAN LINGKUNGAN HIDUP

✓ .HUN 2006

## Freeport Didesak Tinjau Operasi

WASHINGTON (SINDO) - Lembaga Dana Pensiun Kota New York, salah satu pemegang saham Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc, kemarin, mengumumkan rencananya meminta para pemegang saham mendesak perusahaan memperbaiki praktik penanganan lingkungan hidup dalam operasi pertambangannya di Indonesia. Langkah itu merupakan reaksi atas gelombang kritik yang muncul dari pemerintah dan kelompok pemerhati lingkungan hidup Indonesia yang mengklaim perusahaan telah melakukan pelanggaran standar penanganan lingkungan di tambang emas dan tembaga di Papua.

"Catatan lingkungan hidup Freeport-McMoran yang buruk perlu diperiksa. Freeport-McMoRan telah mendapat keuntungan besar dari operasi pertambangannya di Indonesia, jadi setidaknya yang bisa dilakukan perusahaan adalah memastikan bahwa operasinya di sana tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang bisa membahayakan masyarakat Indonesia," papar pengelola Lembaga Pensiun Kota New York William Thompson dalam sebuah pernyataan yang dikutip AFP, kemarin.

Lembaga Dana Pensiun Kota New York mengajak para pemegang saham lain meminta manajemen Freeport-McMoRan mengkaji ulang kebijakan lingkungan hidupnya di Indonesia dalam rapat umum perusahaan September tahun depan. Pertemuan tahunan Freeport-McMoRan biasanya diselenggarakan pada bulan Mei, namun tahun ini ditunda hingga 2007 terkait langkah akuisisi perusahaan terhadap perusahaan tambang Phelps Dodge senilai USD25,9 miliar. Lembaga dana pensiun yang mengelola dana para pen-



**TAMBANG GRASBERG:** Fasilitas PT Freeport Indonesia di tambang Grasberg, Papua. Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc, induk perusahaan Freeport Indonesia, didesak memperbaiki praktik penanganan lingkungan hidup dalam operasi pertambangannya di Indonesia.

sianan pekerja, guru, serta polisi di kota itu tercatat mengontrol 544.458 saham Freeport-McMoRan senilai USD29 juta.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Freeport-McMoRan Bill Collier menegaskan, perusahaan secara reguler telah melakukan audit internal dan eksternal atas praktik lingkungan hidup yang diterapkannya dan memublikasi hasilnya. "Tapi, kami akan meninjau proposal dari pemegang saham tersebut dan akan memberi respons pada saatnya nanti. Namun, saya memperdebatkan karakterisasi atas operasi pertambangan yang telah kami lakukan. Kami memiliki kebijakan lingkungan yang sangat kuat dan proaktif yang disertai pula dengan program pengelolaan lingkungan," papar Collier.

Sejumlah kelompok pemerhati lingkungan beberapa kali menuduh operasi Freeport-McMoRan menyebabkan polusi di Taman Nasional Lorenz, yang merupakan salah satu taman nasional Indonesia yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Mereka

juga mengklaim bahwa perusahaan tersebut membuang limbah dan bijih tembaga di sekitar lokasi operasinya di Papua. Namun, hal itu tegas dibantah Collier.

Sementara itu, dalam situs resminya, PT Freeport Indonesia, anak perusahaan Freeport-McMoRan yang mengelola tambang Grasberg di Papua, menegaskan komitmennya mengelola dan meminimalkan dampak dari kegiatannya terhadap lingkungan serta mereklamasi lahan yang terkena dampak. Melalui kebijakan lingkungannya, perusahaan berkomitmen melaksanakan pengelolaan dan praktik-praktik lingkungan yang baik dan melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja lingkungan di setiap lokasi kegiatan.

Dari sisi ekonomi, perusahaan juga menyatakan bahwa keberadaannya memiliki manfaat langsung maupun tidak langsung yang cukup besar bagi Indonesia. Tahun buku 2005, perusahaan membayarkan USD1,17 miliar dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan iuran. (m faizal)